

BAB 1

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, sejak reformasi, partisipasi perempuan dalam politik, terutama keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan, telah menjadi prioritas utama bagi pemerintah dan legislatif. Afirmasi dan kebijakan penguatan sedang dalam proses. Masyarakat, sebagai salah satu pilar utama demokrasi, memiliki peran yang sangat penting dalam demokrasi yang inklusif untuk memungkinkan partisipasi politik perempuan yang lebih luas dan signifikan. Perempuan harus terlibat dalam politik. Karena mereka dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengontrol, dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan serta berpartisipasi dalam proses pembangunan. Namun, dalam kenyataannya, jumlah perwakilan perempuan di parlemen masih di bawah target 30% (Wahyudi, 2018).

Kehadiran perempuan dalam ruang politik akan berdampak positif pada kinerja lembaga eksekutif dan legislatif. Keikutsertaan perempuan dalam politik menjadikan suara dan kepentingan perempuan akan lebih terwakilkan. Terdapat Beberapa undang-undang terkait pemilu yang mengatur tentang kuota 30% representasi perempuan, bertujuan untuk meningkatkan proporsi perempuan dalam parlemen (Ummaya et al., 2022). Menurut El-Muhtaj, perempuan Indonesia yang berpartisipasi dalam politik menjadi bagian penting dari pemerintahan. Peran perempuan dalam dunia politik sangat penting untuk mewakili suara perempuan di Indonesia (Haryanti, 2021).

Regulasi formal mengenai pemilu di Indonesia terus berkembang, dimulai dengan hadirnya UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam UU No. 2 Tahun 2008, ditetapkan bahwa partai politik harus mencakup keterwakilan perempuan minimal sebesar 30%. Ketentuan ini kemudian diperkuat dengan UU No. 8 Tahun 2012 yang mengatur pemilu legislatif, yang mencakup sembilan pasal yang spesifik mengenai keterwakilan perempuan dalam struktur

partai politik (Izdiha, 2017). Kedudukan perempuan di lembaga eksekutif dan legislatif memungkinkan mereka untuk secara strategis memengaruhi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan perempuan. Dalam hal ini peneliti tertarik ingin membahas tentang perempuan dalam politik dalam bidang eksekutif yakni dalam kabinet pemerintahan. Pemilihan pejabat kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

Kabinet adalah sekelompok pejabat negara yang dipilih oleh presiden untuk menjabat sebagai kepala pemerintahan, fungsi utama cabang eksekutif. Kabinet juga dapat disebut sebagai Dewan Menteri, Dewan Eksekutif, atau Komite Eksekutif; istilah ini tentu saja bervariasi tergantung pada sistem pemerintahan negara dan kepala eksekutif, yang dapat berupa presiden atau perdana menteri. Jumlah menteri dalam kabinet setiap negara bervariasi, meskipun umumnya berkisar antara sepuluh hingga dua puluh menteri. Berbagai penelitian menunjukkan adanya hubungan antara tingkat pembangunan suatu negara dan ukuran kabinetnya, hampir semua negara yang lebih maju cenderung memiliki kabinet yang lebih kecil. Di Indonesia, berdasarkan catatan historiografi, telah terbentuk setidaknya 40 kabinet sejak awal kemerdekaan pada tahun 1945 hingga saat ini. Kabinet pertama Indonesia dibentuk pada 2 September 1945 (Fahlevi & Huda, 2020).

Setelah dilantik menjadi Presiden 2024, Prabowo mengumumkan jajaran kabinet republik Indonesia tahun 2024-2029 bernama Kabinet Merah Putih pada tanggal 20 Oktober 2024, di Istana Merdeka, Jakarta. Dilansir dari laman resmi setkab.go.id, terdapat 48 Menteri yang terdiri dari 43 Laki-laki dan 5 Perempuan, sedangkan untuk wakil menteri sebanyak 56 dengan rincian 47 Laki-laki dan 9 Wanita, serta terdapat 5 kepala badan tidak dibawah koordinasi menko (setkab.go.id, 2024).

Table 1.1 Nama-nama perempuan dalam Kabinet Merah Putih

No	Nama	Jabatan
1.	Sri Mulyani Indrawati	Menteri Keuangan

2.	Meutya Viada Hafid	Menteri Komunikasi dan Digital
3.	Rini Widyantini	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
4.	Widiyanti Putri Wardhana	Menteri Pariwisata
5.	Arifatul Choiri Fauzi	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6.	Ribka Haluk	Wakil Menteri Dalam Negeri
7.	Stella Christie	Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
8.	Christina Aryani	Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
9.	Dyah Roro Esti Widya Putri	Wakil Menteri Perdagangan
10.	Diana Kusumastuti	Wakil Menteri Pekerjaan Umum
11.	Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka	Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
12.	Ni Luh Enik Ermawati	Wakil Menteri Pariwisata
13.	Irene Umar	Wakil Menteri Ekonomi Kreatif
14.	Veronica Tan	Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sumber : (setkab.go.id, 2024)

Menurut Koentjaraningrat (dalam Izdiha, 2017) bahwa Perilaku adalah salah satu dari tiga jenis kebudayaan. Perilaku perempuan politik juga termasuk dalam kategori ini. satu elemen dari perspektif budaya politik mengalami peningkatan di kalangan politisi perempuan. Sejalan dengan hal itu, Menurut Sastroatmodjo (dalam Izdiha, 2017) mendefinisikan kebudayaan politik suatu bangsa sebagai penyebaran pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik di antara masyarakat bangsa. Pola-pola ini dapat digunakan dengan memahami berbagai cara yang sistematis seseorang mengorientasikan dirinya terhadap

objek politik yang mereka pahami. Objek politik terdiri dari tiga bagian. Yang pertama adalah komponen kognitif, yang mencakup pengetahuan tentang politik dan keyakinan terhadap politik, peranan, dan tanggung jawabnya. Komponen kedua adalah orientasi afektif, yang mencakup perasaan tentang sistem politik, peranannya, aktor, dan penampilannya. Komponen ketiga adalah orientasi evaluatif, yang mencakup keputusan dan praduga tentang objek politik, yang biasanya melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria.

Dari penjelasan diatas, dapat dijadikan landasan dari bahwa fenomena "politik perempuan" ini dilihat bahwa bagaimana perempuan mengekspresikan politik melalui pengalaman, bukan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan. Namun, bagaimana politik dapat menjadikan perempuan untuk lebih berperan bagi perempuan lain. Bagi perempuan, politik menjadi sebuah "khayalan" sebagai upaya untuk memenuhi berbagai "kebutuhan" perempuan yang belum terpenuhi. Politik dianggap sebagai cara untuk meminta hak-hak perempuan (Izdiha, 2017). Hadirnya 14 perempuan yang terpilih dalam kabinet merah putih merupakan kolaborasi dari kemampuan, keahlian dan pengalaman yang menjadikan 14 perempuan ini terpilih menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo-Gibran yang di harapkan untuk dapat menghasilkan keputusan dan program yang dapat menyuarkan kepentingan perempuan.

Berbagai media memberikan sudut pandangnya tentang keterwakilan perempuan dalam politik, karena dalam pembangunan nasional suara perempuan sangat di perlukan untuk mewakili perempuan dan kaum marginal. Pada pasal 3 ayat 1 Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menjelaskan bahwa Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, edukasi, hiburan dan control sosial bagi masyarakat agar mendorong daya pikir kritis dan selalu maju untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih baik .

Media memiliki kemampuan yang signifikan untuk membentuk pandangan publik dan memengaruhi dinamika komunikasi politik. Melalui berbagai konten yang disajikannya, media massa dapat mengangkat isu-isu politik yang berkaitan dengan perempuan, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya partisipasi politik perempuan, serta memperdalam

pemahaman tentang peran dan kontribusi perempuan dalam memperkuat demokrasi. Dalam konteks ini, media massa berperan dalam meningkatkan akses dan visibilitas perempuan di ranah politik, yang pada gilirannya dapat menginspirasi dan mendorong perempuan untuk lebih aktif terlibat dalam proses demokrasi. Pemberdayaan perempuan melalui media massa merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dan mendorong keterlibatan mereka dalam kehidupan politik. Media berperan penting dalam menciptakan suasana yang inklusif dan mendorong perempuan untuk terlibat dalam dunia politik.(Yoteni et al., 2023).

Menurut Soemandoyo (dalam Orwella, 2014) posisi media dalam kaitannya dengan isu gender berada pada posisi yang menarik. Sebab, media dapat turut mendorong penghapusan stereotip yang sudah kadaluarsa tentang perempuan. Di sisi lain, media juga dapat menghambat perubahan signifikan dalam masyarakat terkait stereotip tentang perempuan. Jika media massa yang berfungsi sebagai media informasi bagi masyarakat masih saja memberikan stigma gender pada produk dan lembaganya, maka sulit dibayangkan bagaimana proses pemberdayaan dapat berjalan dengan baik.

Dalam memberitakan fakta, media berinteraksi dengan berbagai kepentingan yang kompleks dan beragam, mulai dari ideologi hingga kepentingan kapitalisme pemilik modal. seperti Institusi yang dapat membentuk opini publik, media dapat berpengaruh, tergantung pada pentingnya diwakili. Ini termasuk dalam menggambarkan bagaimana perempuan berfungsi dalam dunia politik. melalui beritanya. Melalui teks beritanya, media menciptakan realitas tentang persepsi perempuan dalam politik, di mana kenyataan yang dikonstruksi oleh media bukanlah kenyataan yang bebas nilai, tetapi kenyataan yang terbentuk dalam konteks sosial yang rumit (Indiyati et al., 2018).

Setiap media tentu memberikan pandangan yang berbeda dalam membingkai suatu fenomena, Data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berupa wacana berita yang terbit pada 15 Oktober 2024 hingga 15 November 2024 dalam dalam beberapa media massa di Indonesia diantaranya Okezone.com, Mediaindonesia.com, dan Cantika.com. Peneliti mengambil tiga

media untuk membandingkan ketiganya dalam memberitakan 14 perempuan dalam kabinet merah putih. Okezone.com, portal media dengan audience yang luas dan beragam, sehingga menyajikan berita yang hangat dan menarik perhatian. Mediaindonesia.com, lebih cenderung mengedepankan reputasi media yang serius dan politis, sehingga pembahasan tentang representasi perempuan dalam politik dominan pemberitaan tentang kinerja, kebijakan dan dampak politik. Cantika.com, salah satu portal media yang memberitakan tentang 14 perempuan dalam kabinet merah putih dengan sudut pandang yang berbeda dari 2 media sebelumnya, Cantika lebih berfokus pada pemberitaan tentang fashion, sisi personal, dan gaya dari perempuan di kabinet merah putih.

Penelitian ini menjadi berbeda karena selain menggunakan 3 media dengan sudut pandang yang berbeda, penelitian ini menggunakan analisis framing model pan & kosicki sebagai alat dalam menganalisis artikel berita untuk mengetahui perspektif media pada perempuan dalam kabinet merah putih. Dengan perangkat framing yaitu sintaksis (skema berita), skrip (kelengkapan berita), tematik yang menekankan (detail, koherensi, bentuk kalimat, dan kata ganti), retorik menekankan pada (pemilihan kata, kiasan, dan grafis). Penelitian ini juga memadukan analisis dari 2 teori yakni teori representasi Stuart Hall untuk mengetahui konstruksi makna dari setiap media mengenai perempuan dalam kabinet merah putih dan teori male gaze Laura Mulvey sebagai analisis lanjutan untuk mengetahui dampak dari representasi atas perempuan dalam kabinet merah putih.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat diambil rumusan masalah bagaimana representasi perempuan dalam Kabinet Merah Putih dengan analisis framing pada situs berita Okezone.com, Mediaindonesia.com, Cantika.com?

1.3 Tujuan

Untuk mengetahui representasi perempuan dalam Kabinet Merah Putih dengan analisis framing pada situs berita Okezone.com, Mediaindonesia.com, Cantika.com

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada pemahaman mengenai komunikasi politik, terutama terkait dengan pengaruh media terhadap opini publik mengenai pemimpin perempuan di Kabinet Merah Putih.
2. Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur tentang representasi perempuan dalam politik di media.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan pemahaman kepada media untuk mengurangi keberpihakan dalam laporan berita.
2. Membantu pembaca menyadari bagaimana cara penyajian informasi dapat memengaruhi persepsi mereka terhadap perempuan dalam dunia politik.